

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Jl. May. Jen. Sutoyo - Cililitan - Jakarta Timur

Sumber : <i>Media Indonesia</i>	Hari/Tgl : <i>Senin, 27 Mei 2024</i>	Hlm/Kol : <i>3/1-3</i>
Subjek : <i>UU - PILKADA - REVISI</i>		Bidang : <i>HTN</i>

Revisi UU Antisipasi Kecurangan

Kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait dengan asusila yang sedang bergulir di DKPP membayangi penyelenggaraan Pilkada 2024.

TRI SUBARKAH

subarkah@mediaindonesia.com

POTENSI kecurangan saat penyelenggaraan Pilkada 2024 diprediksi lebih marak terjadi ketimbang pada Pemilu 2024 lalu. Selain persoalan regulasi yang masih banyak celah, masalah integritas Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang diduga terlibat kasus etik bakal jadi faktor berpengaruh.

Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, masih banyak celah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10/2016 sebagaimana UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2024.

Oleh karenanya, Lili mendorong pembentuk undang-undang untuk segera merevisi UU Pilkada. Apalagi revisi tersebut juga sudah direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terdahulu.

"Hal-hal yang potensi muncul, yaitu penggunaan dana hibah atau bantuan sosial, dukungan petahana atas kandidat karena politik dinasti, netralitas aparatur sipil negara (ASN), klientelisme, dan *money politics*," kata Lili kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Dalam hal ini Lili mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk lebih proaktif dan mencari terobosan yang dapat diterapkan dalam pengawasan Pilkada 2024 agar potensi kecurangan tidak ada lagi.

Saat dikonfirmasi, anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malondá mengakui peraturan Bawaslu yang disetujui pembentuk undang-undang pada Rabu (22/5) baru mengatur pengawasan pilkada yang sifatnya umum.

Terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, saat ini pihaknya masih mengacu pada Perbawaslu Nomor 6/2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri.

Komisioner KPU RI Idham Holik berjanji bakal mem-

perkuat kepemimpinan penyelenggara daerah guna menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi saat pemilu tidak terulang pada pilkada.

"Ya, kami dalam menyelenggarakan pemilu serentak tentunya berupaya menjalankan peraturan perundang-undangan, KPU fokus pada penguatan kepemimpinan sumber daya penyelenggara pilkada di daerah," ungkapnya, kemarin.

Dugaan asusila

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity Hadar Nafis Gumay mengatakan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait dengan tindakan asusila oleh Hasyim Asy'ari terhadap salah seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang sedang bergulir di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membayangi penyelenggaraan Pilkada 2024.

Dikatakan mantan komisioner KPU itu, meskipun secara teknis tahapan tidak

Sambungan

Sumber : *Media Indonesia*

Hari/Tgl : *Senin, 27 Mei 2024*

Hlm/Kol : *3/1-3*

terganggu, publik bakal memiliki persepsi tersendiri terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara Pilkada 2024 dalam kepemimpinan Hasyim. Itu berkaca dari bagaimana kekecewaan publik yang diungkapkan terhadap KPU saat Pemilu 2024 pada Februari lalu.

"Di dalam Pemilu 2024 kemarin, sebetulnya banyak pertanyaan dan kecurangyakinan dari publik, tapi kan itu berjalan begitu saja. Dengan sanksi peringatan keras berkali-kali oleh DKPP, orang jadi skeptis meragukan pemilu," ujarnya, kemarin.

Terpisah, anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pihaknya berkepentingan untuk menciptakan suasana kondusif dalam sidang, termasuk perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) oleh Hasyim terkait dengan tindakan asusila. (Ykb/P-2)